

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah diawali dengan kondisi ekonomi makro nasional, sebagai gambaran umum untuk mengantarkan uraian situasi perekonomian DKI Jakarta tahun 2005 dan semester I tahun 2006 berikut karakteristiknya serta prospek perekonomian tahun 2007-2009. Bab ini juga membahas mengenai tantangan perekonomian Jakarta serta gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah.

A. Kondisi Ekonomi Makro Nasional

Di tahun mendatang, diperkirakan pembangunan ekonomi Indonesia masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud meliputi sebagai berikut:

1. Persoalan pemantapan kinerja dan stabilitas ekonomi makro sebagai prasyarat bagi kesinambungan pembangunan ekonomi. Upaya yang sungguh-sungguh untuk menjaga dan memantapkan stabilitas ekonomi makro dimaksud merupakan keharusan, mengingat masih adanya potensi gejolak eksternal terkait dengan tingginya harga minyak dunia dan ketidakseimbangan global (*global imbalances*) pada aliran likuiditas jangka pendek. Hal tersebut akan mempengaruhi stabilitas moneter dan ketahanan fiskal dalam negeri.

Pemerintah, dalam rangka menjaga dan memantapkan kinerja ekonomi makro, terus berupaya untuk mengatasi dampak gejolak ekonomi domestik dan global, seperti laju inflasi dan suku bunga yang masih relatif tinggi. Upaya ini perlu didukung oleh langkah konkret dan sungguh-sungguh dalam memperkuat koordinasi dan efektifitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil di dalam negeri.

2. Percepatan pertumbuhan ekonomi nasional akan terus dipacu dengan mengembangkan pertumbuhan yang lebih berimbang, yang bertumpu pada peran investasi dan ekspor non migas. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.
3. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif adalah tantangan yang cukup besar bagi pemerintah dewasa ini. Komitmen perbaikan iklim investasi tersebut telah dilakukan pemerintah dengan diluncurkannya paket kebijakan investasi pada Bulan Februari 2006. Paket kebijakan investasi tersebut mencakup perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan, pelayanan, dan penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan birokrasi.
4. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar Indonesia dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Lemahnya pasokan energi listrik, keterbatasan jaringan telekomunikasi, dan kepadatan jalan telah menjadi persoalan mendasar bagi upaya peningkatan investasi dan daya saing ekspor Indonesia.
5. Meningkatkan daya saing ekspor, untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekspor yang tinggi. Tingginya pertumbuhan ekspor diperlukan tidak saja sebagai penopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan juga untuk merangsang penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan bermutu.
6. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah

dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.

7. Membangun landasan yang kokoh bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa-masa yang akan datang.

Di tahun-tahun mendatang, perekonomian Indonesia secara bertahap diharapkan akan kembali membaik. Hal ini dimungkinkan karena didukung dengan semakin stabilnya ekonomi makro dan pulihnya daya beli serta kepercayaan investasi. Kestabilan ekonomi tersebut tercermin pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi, menguatnya nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta menurunnya laju inflasi.

Pertumbuhan ekonomi di tahun 2007, akan mencapai kinerja seperti yang diharapkan atau tidak akan tergantung pada kerja keras semua pihak. Hal ini mengingat masih adanya faktor resiko yang harus diwaspadai, baik dari sisi internal maupun eksternal.

Dari sisi internal, terjadinya eksese likuiditas global dan ketidakstabilan harga pangan sebagai akibat dari terganggunya kelancaran arus distribusi barang, yang disebabkan oleh terjadinya bencana alam di beberapa daerah, berpotensi mendorong peningkatan laju inflasi. Dari sisi eksternal, faktor resiko dimaksud terutama berkaitan dengan melonjaknya harga minyak mentah dunia serta berlanjutnya kebijakan moneter ketat dari negara Amerika dan Uni Eropa, diperkirakan akan berdampak pada meningkatnya laju inflasi dunia dan volatilitas nilai tukar rupiah. Melalui langkah-langkah yang terkoordinasi antar sektor fiskal, moneter, dan sektor riil, diharapkan dapat teratasinya berbagai tekanan tersebut sehingga momentum pemulihan ekonomi terus terpelihara.

Nilai tukar rupiah diharapkan terus menguat dengan arus modal masuk yang cukup signifikan dengan volatilitas yang diupayakan terjaga. Secara fundamental penguatan rupiah ini didukung oleh surplus neraca pembayaran, baik pada kinerja transaksi berjalan maupun neraca modal. Surplus transaksi berjalan disebabkan oleh melambatnya impor dan bertahannya kinerja ekspor, sedangkan surplus pada neraca modal

terutama terkait dengan meningkatnya *portfolio investment* di pasar saham, Sertifikasi Bank Indonesia (SBI), dan Surat Utang Negara (SUN). Disparitas suku bunga domestik dan internasional juga akan mengecil sehingga pada gilirannya akan menyebabkan koreksi terhadap rupiah hingga akhir tahun 2006.

Dengan perkembangan tersebut, selama tahun 2006 rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan mencapai sekitar Rp. 9.000/US\$ atau menguat dibanding tahun 2005 yang mencapai rata-rata Rp. 9.705/US\$. Seiring dengan menguatnya nilai tukar rupiah, laju inflasi dapat dikendalikan pada tingkat yang relatif rendah dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga sasaran inflasi sebesar 8,0 persen dalam tahun 2006 diperkirakan akan dapat dicapai.

Dengan kebijakan moneter yang relatif ketat, suku bunga SBI 3 bulan dalam empat bulan pertama tahun 2006 cenderung stabil pada kisaran 12,64–12,92 persen. Tetapi, dengan menguatnya nilai tukar rupiah dan menurunnya laju inflasi, suku bunga SBI 3 bulan diperkirakan akan menurun hingga mencapai sekitar 10-11 persen pada akhir tahun 2006. Dengan perkembangan tersebut, selama tahun 2006, rata-rata suku bunga SBI 3 bulan diperkirakan mencapai sekitar 12 persen, lebih tinggi dari perkiraan semula dalam APBN yaitu sebesar 9,5 persen.

Kinerja perekonomian makro yang relatif baik tersebut telah memacu meningkatnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta hingga mencapai level 1.310,26 pada penutupan perdagangan di akhir Bulan Juni 2006. Peningkatan ini cukup signifikan dibandingkan dengan level akhir tahun yang hanya mencapai 1.162,63. Situasi perbankan secara umum juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini tercermin dari meningkatnya kegiatan intermediasi perbankan. Jumlah dana yang dihimpun diperkirakan akan meningkat dan pertumbuhan kredit diperkirakan masih cukup tinggi.

Kinerja neraca pembayaran juga diperkirakan membaik dalam tahun 2006, terlihat dari meningkatnya surplus transaksi berjalan dan neraca modal yang bersumber dari peningkatan ekspor yang lebih tinggi dari impor

dan meningkatnya penerimaan jasa-jasa tenaga kerja. Kecenderungan ini didorong oleh meningkatnya ekspor non migas dan migas.

Di lain pihak terjadi kecenderungan positif yaitu peningkatan surplus neraca modal terutama terkait dengan meningkatnya penanaman modal langsung (*Foreign Direct Investment*) dan investasi *portfolio*. Investor asing yang masih tetap tertarik menanamkan modalnya di Indonesia karena masih tingginya potensi keuntungan yang akan diperoleh. Hal ini tercermin pada selisih antara suku bunga dalam dan luar negeri yang cukup besar. Sebagai akibat dari surplus transaksi berjalan dan neraca modal tersebut, posisi cadangan devisa akhir tahun 2006 diperkirakan cukup tinggi mencapai US\$41,8 miliar atau setara dengan 4,8 bulan impor dan pembayaran cicilan utang luar negeri pemerintah. Posisi tersebut lebih baik dari posisi akhir tahun 2005 yang mencapai US\$34,7 miliar.

Dalam tahun 2007, kondisi perekonomian Indonesia diharapkan akan menghadapi beberapa tantangan baik yang berasal dari faktor-faktor internal maupun faktor-faktor eksternal. Dari sisi eksternal, harga minyak bumi masih sulit diprediksi meskipun diperkirakan masih cukup tinggi. Selain itu pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mengalami perlambatan, yaitu dari 4,9 persen pada tahun 2006 menjadi 4,7 persen pada tahun 2007. Hal ini antara lain disebabkan oleh melemahnya pertumbuhan ekonomi di beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Kawasan Uni Eropa.

Begitu juga di negara berkembang yang diperkirakan menurun menjadi 6,6 persen dibanding dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2005 yang mencapai 6,9 persen. Walaupun demikian, di negara-negara ASEAN-4 (Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura) diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan lebih baik dari kondisi tahun 2006.

Dari sisi internal, sejak krisis ekonomi tahun 1997, kemampuan perekonomian dalam menciptakan lapangan kerja akan terus diupayakan untuk terus berkembang. Hanya saja berbagai kendala, baik yang berkaitan dengan iklim investasi maupun kemampuan penyerapan tenaga kerja baru yang akan menjadi hambatan diupayakan untuk terus diatasi. Sebagai gambaran, dalam tahun 2000-2004, untuk setiap 1 persen pertumbuhan

ekonomi rata-rata hanya mampu menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 215 ribu orang, sedangkan dalam tahun 1994, untuk setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja sebanyak 370 ribu orang. Dengan kondisi yang telah disebutkan di atas, dibutuhkan berbagai kebijakan untuk memperlancar pembangunan ekonomi Indonesia.

B. Kondisi Ekonomi Makro Provinsi DKI Jakarta

Kinerja perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2005 menunjukkan indikasi yang cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi mencapai 6,01 persen dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai nilai Rp. 436,25 triliun (atas dasar harga berlaku) dengan sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor tersier (perdagangan dan jasa) sebesar 72,00 persen, kemudian sektor sekunder (industri pengolahan dan bangunan) dengan sumbangan sebesar 26,30 persen.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh ekspor barang dan jasa serta investasi (berupa pembentukan modal tetap bruto) yang masing-masing tumbuh 17,01 persen dan 10,62 persen. Sementara itu, konsumsi masyarakat tumbuh sebesar 8,92 persen serta pengeluaran pemerintah sebesar 6,67 persen.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yang tumbuh 7,89 persen serta sektor tersier lainnya terutama pengangkutan dan komunikasi; serta keuangan dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa yang masing-masing tumbuh sebesar 13,26 persen; 4,10 persen; dan 5,06 persen. Adapun sektor industri pengolahan dan sektor bangunan tumbuh masing-masing 5,07 persen dan 5,89 persen.

Beberapa hasil telaah dan kajian empiris menunjukkan bahwa perkembangan perekonomian Jakarta berkorelasi positif dengan perkembangan perekonomian nasional. Pada semester I tahun 2006, perekonomian DKI Jakarta tumbuh sebesar 5,55 persen bila dibandingkan dengan semester yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2006 perekonomian DKI Jakarta diperkirakan tumbuh sebesar 6,00 persen

dengan besaran PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 512,80 triliun dan besaran riilnya mencapai Rp. 312,91 triliun (harga konstan 2000). Pertumbuhan ekonomi yang dicapai ini harus didukung oleh stabilitas faktor-faktor non-ekonomi seperti sosial politik, ketentraman dan ketertiban. Dengan demikian harapan pemerintah selama ini bahwa tahun 2006 sebagai tahun ke dua tahap pemantapan sosial-ekonomi DKI Jakarta dapat terwujud, sekaligus menjadi modal utama dalam meningkatkan perkembangan ekonomi Jakarta di tahun-tahun mendatang.

Laju inflasi DKI Jakarta pada tahun 2005 sebesar 16,06 persen sedikit lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 17,11 persen. Hal ini disebabkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu menjaga stabilitas distribusi bahan pokok, sehingga gejolak harga relatif terkendali. Sementara pada tahun 2006, sampai dengan bulan Juni laju inflasi mencapai 2,64 persen dan pada akhir 2006 inflasi diperkirakan akan mencapai level 9,9 persen. Angka ini jauh di bawah angka tahun 2005, karena pada tahun 2005 tingginya inflasi disebabkan oleh adanya dua kali kenaikan BBM.

Pada tahun 2005 nilai ekspor yang melalui DKI Jakarta meningkat sebesar 10,03 persen dari nilai tahun sebelumnya atau mencapai 24,50 miliar Dollar Amerika. Hal ini disebabkan karena situasi perekonomian dunia yang relatif kondusif, relatif terkendalinya nilai tukar rupiah, serta membaiknya kondisi fiskal dan moneter di dalam negeri menjadi faktor penting yang mendorong meningkatnya perdagangan luar negeri khususnya berkaitan dengan nilai ekspor DKI Jakarta. Sedangkan untuk tahun 2006, sampai dengan bulan April, ekspor yang melalui DKI Jakarta mencapai 9,24 miliar Dollar Amerika atau meningkat 8 persen dibanding periode yang sama tahun 2005.

Nilai impor DKI Jakarta tercatat sebesar 26,83 miliar Dollar Amerika pada tahun 2005, meningkat sebesar 12,35 persen bila dibandingkan dengan tahun 2004. Namun pada tahun 2006, sampai dengan bulan April, nilai impor DKI Jakarta terjadi penurunan sebesar 10,61 persen atau sebesar 6,22 miliar Dollar Amerika dibanding periode yang sama tahun lalu.

Jakarta tampaknya semakin atraktif bagi wisatawan mancanegara yang ditandai dengan meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara. Pada

tahun 2005 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,17 juta orang atau meningkat sebesar 9,68 persen dibandingkan keadaan tahun 2004. Untuk tahun 2006, dari Januari sampai dengan Juni, jumlah wisatawan mancanegara yang tercatat telah mencapai 600.038 orang atau meningkat 6,66 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan demikian, sepanjang tahun 2006 diharapkan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jakarta meningkat menjadi 1,31 juta orang. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ini tidak terpisahkan dari situasi perekonomian dunia yang semakin kondusif.

Perkembangan kondisi perekonomian Provinsi DKI Jakarta yang cukup baik tersebut masih memerlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitasnya. Ini terindikasi dari belum optimalnya penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi. Pada tahun 2005 masih terdapat sekitar 600 ribu orang atau 14,35 persen angkatan kerja belum terserap oleh lapangan kerja yang tersedia. Sedangkan pada tahun 2006 diperkirakan terjadi penurunan angka pengangguran menjadi sekitar 570 ribu orang atau 13,36 persen.

C. Kemampuan Daerah Dalam Membiayai Investasi

Besaran nilai investasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan dinamika perekonomian daerah. Di samping untuk mendorong perekonomian daerah, peningkatan investasi juga diharapkan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Pada tahun 2005, investasi di DKI Jakarta yang dihitung dengan menggunakan komponen pembentukan modal atas dasar harga konstan 2000 menunjukkan besaran nilai sekitar 78,67 triliun rupiah. Bila dihitung dengan menggunakan harga berlaku nilainya mencapai 140,86 triliun rupiah.

Pada tahun 2006, pembentukan modal di Jakarta secara riil diharapkan akan mengalami peningkatan sebesar 8,07 persen, atau secara nominal berdasarkan harga konstan 2000 mencapai nilai sekitar 85,02 triliun, dan dengan harga tahun berjalan mencapai nilai sekitar 153,84 triliun rupiah.

Kebutuhan investasi tersebut dibiayai oleh pemerintah pusat, daerah dan masyarakat. Pada tahun 2005 peranan investasi yang dilakukan oleh

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 5,29 persen dan pada tahun 2006 diperkirakan meningkat menjadi 5,56 persen terhadap total investasi yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan kemampuan keuangan daerah mengalami sedikit peningkatan dalam peranannya menyumbang investasi. Sedangkan investasi swasta banyak memberikan perhatian kepada bidang jasa pengangkutan, gudang, komunikasi, konstruksi, hotel dan restoran, serta jasa lainnya.

Namun demikian pada waktu-waktu mendatang perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap faktor-faktor yang dapat memacu arus investasi swasta ke Jakarta, diantaranya dengan meningkatkan penyediaan infrastuktur, menyehatkan iklim ketenagakerjaan, dan kepastian hukum serta senantiasa melakukan upaya peningkatan pelayanan perijinan.

Selain itu, sejalan dengan kebijakan belanja daerah tahun 2007 yang tertera dalam RKP 2007, pemerintah pusat menetapkan peningkatan kapasitas daerah dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan Rasio PAD terhadap PDRB dapat menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah, karena PAD adalah indikator kemampuan daerah dalam menggali pendapatan yang berasal dari daerah.

Tabel III.1. Perbandingan PAD dan Pendapatan Daerah terhadap PDRB, Tahun 2004, 2005, dan 2006

Uraian	2004	2005	2006 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
PDRB (Triliun Rupiah)	375,56	436,25	512,80
PAD (Triliun Rupiah)	6,14	7,07	8,60
Pendapatan Daerah (Triliun Rupiah)	11,01	12,44	15,09
Perbandingan PAD terhadap PDRB (%)	1,63	1,62	1,68
Perbandingan Penerimaan Daerah terhadap PDRB (%)	2,93	2,85	2,94

Sumber: Biro Keuangan dan BPS DKI Jakarta
Keterangan: *) Angka Proyeksi

Pada tahun 2004 rasio PAD terhadap PDRB sebesar 1,63 persen, walaupun pada tahun 2005 mengalami penurunan, tetapi penurunannya sangat kecil sebesar 0,01 persen, tepatnya besar rasio tahun 2005 adalah 1,62 persen. Pada tahun 2006 rasio angka ini diperkirakan naik menjadi 1,68

persen. Peningkatan ini menunjukkan bahwa PAD yang dihasilkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara proporsional terhadap PDRB DKI Jakarta mulai menunjukkan perbaikan.

D. Tantangan Pokok

Perekonomian Jakarta baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan eksternal dan internal. Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dan pusat pemerintahan, perekonomian Jakarta sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian nasional. Selain itu, sebagai kota yang terbuka, perekonomian Jakarta juga dipengaruhi oleh kondisi dan dinamika perekonomian internasional. Berdasarkan kondisi tersebut, **faktor eksternal** yang diidentifikasi mempengaruhi perekonomian Jakarta pada tahun 2007-2009 adalah: **Pertama**, menguatnya globalisasi ekonomi dunia dan pembentukan zona ekonomi regional di beberapa negara: China, India, Vietnam, Thailand, dan di banyak negara lainnya; fenomena ini akan mengakibatkan kompetisi yang semakin ketat dalam hal menarik investasi, perdagangan dan pariwisata antar negara. **Kedua**, kurang ekspansifnya kebijakan fiskal dan moneter nasional, yang akan mempengaruhi aktivitas sektor riil. **Ketiga**, masih adanya distorsi perdagangan antar daerah dan trans-nasional; kegiatan ini sedikit banyak mempengaruhi kelancaran distribusi barang ke Jakarta dan pada gilirannya berdampak pada tingkat inflasi. **Keempat**, keterbatasan keuangan negara; kondisi ini akan mempengaruhi kemampuan pembiayaan pembangunan daerah. **Kelima**, gejala megapolitan dalam kesatuan tata ruang; kondisi ini akan mempengaruhi keberlanjutan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Sedangkan **faktor internal** yang diperkirakan akan mempengaruhi perekonomian Jakarta untuk tahun 2007-2009 adalah: **Pertama**, jumlah penduduk; kondisi ini di satu sisi merupakan potensi pasar barang dan jasa, namun di sisi lain merupakan beban pembangunan ekonomi bila tidak dikelola secara produktif. Migrasi yang masuk ke Jakarta masih didominasi oleh penduduk dengan karakteristik sosial-ekonomi yang rendah. Akibatnya

dari tahun ke tahun beban penduduk Jakarta semakin berat. **Kedua**, infrastruktur kota; penyediaan sarana dan prasarana kota yang dilakukan selama ini sudah relatif baik, mempengaruhi tingkat efisiensi perekonomian. **Ketiga**, Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; kebijakan bidang perekonomian belum memberikan dampak yang seimbang antara sektor formal dan informal. **Keempat**, iklim ketenteraman dan ketertiban yang kondusif; kondisi ini sangat mempengaruhi kelancaran usaha, aktivitas ekonomi dan kepariwisataan.

Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Daerah (Renstrada) 2002-2007, perekonomian Jakarta pada tahun 2007 masuk dalam tahapan III yaitu tahap pemantapan (*stabilization stage*) ekonomi yang merupakan lanjutan dari tahap pemulihan (*recovery stage*) ekonomi. Pada tahun 2007-2009, Jakarta diperkirakan akan menghadapi beberapa tantangan pokok di bidang ekonomi yang akan menghambat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi seperti: (1) Terbatasnya lapangan kerja yang berkualitas, jumlah penduduk miskin yang masih cukup tinggi, dan mutu pelayanan publik masih rendah; (2) Kurang berkembangnya kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); (3) Kondisi keamanan dan ketertiban serta prosedur perijinan yang masih belum kondusif untuk peningkatan iklim investasi; dan (4) Infrastruktur kota yang belum memadai.

Oleh karena itu, tantangan tersebut harus dapat diatasi secara tepat dan proporsional melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Perlunya meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan hasil pembangunan ekonomi.
2. Perlunya memantapkan kembali kinerja perekonomian dan pemberdayaan masyarakat, walaupun perekonomian Jakarta telah menunjukkan hasil yang cukup baik, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian yang telah berhasil dicapai, agar terus diikuti dengan upaya pemberdayaan masyarakat secara lebih memadai.
3. Perlunya meningkatkan pemberdayaan kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan

perekonomian Jakarta, dan mampu memperbesar daya serapnya terhadap tenaga kerja.

4. Perlunya menciptakan iklim kondusif bagi perekonomian daerah, sebagai salah satu prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan (terpercaya, memiliki kemudahan, dan efisien).
5. Perlunya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, dalam upaya menjaga kelancaran kegiatan ekonomi, transaksi bisnis, dan investasi.
6. Perlunya menyediakan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah termasuk di dalamnya adalah peningkatan efisiensi distribusi barang dan jasa. Infrastruktur jalan raya perlu ditingkatkan baik volume maupun kualitasnya.

E. Prospek Ekonomi Tahun 2007-2009

Fokus kebijakan ekonomi makro DKI Jakarta tahun 2007-2009 adalah pemantapan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan utama menciptakan kesempatan kerja, mengurangi penduduk miskin, meningkatkan mutu pelayanan publik dan mengelola migrasi masuk.

Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dituntut mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan di atas maka usaha-usaha yang harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah yaitu: **Pertama**, menciptakan ketenteraman dan ketertiban sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah. **Kedua**, menyederhanakan prosedur perijinan usaha. **Ketiga**, menyediakan infrastruktur kota untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah. **Keempat**, menyempurnakan sistem pengupahan guna peningkatan produktivitas tenaga kerja, **Kelima**, pemberdayaan UMKM dan masyarakat miskin dengan meningkatkan koordinasi berbagai institusi melalui jaringan sistem keuangan mikro.

Keenam, memperbaiki modal sosial khususnya etos kerja dalam rangka peningkatan produktivitas kerja. **Ketujuh**, efisiensi alokasi sumber daya dan dana dalam perekonomian daerah.

Berdasarkan kondisi riil perekonomian Jakarta tahun 2005 dan perkiraan tahun 2006, maka prospek perekonomian tahun 2007-2009 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus meningkat, yaitu tahun 2007 tumbuh 6,61 persen, tahun 2008 tumbuh 6,92 persen, dan tahun 2009 tumbuh 6,50 persen;
2. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut, investasi yang dibutuhkan untuk tahun 2007 sebesar Rp. 175,49 triliun, tahun 2008 sebesar Rp. 199,83 triliun, dan tahun 2009 sebesar Rp. 227,72 triliun;
3. Dengan kondisi di atas, diharapkan jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2007 mencapai 3,81 juta orang dan pada akhir tahun 2009 mencapai 4,03 juta orang, sehingga tingkat pengangguran terbuka pada periode yang sama diharapkan dapat ditekan menjadi 11,80 persen;
4. Dengan asumsi jumlah penduduk tahun 2007 sebesar 8,81 juta orang, persentase jumlah penduduk miskin ditargetkan turun hingga di bawah 4,9 persen.

Untuk mengetahui gambaran yang lebih detil mengenai kinerja ekonomi makro DKI Jakarta, kebutuhan investasi, kekuatan ekonomi sektoral, dan kecenderungan beberapa indikator sosial dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

**Tabel III.2. Matriks Indikator Makro Ekonomi Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2001-2009**

Deskripsi	Kondisi Awal					Proyeksi			
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
EKONOMI									
1. PDRB-Harga Berlaku (Triliun Rp.)	263,69	299,97	334,33	375,56	436,25	512,80	584,97	666,10	759,06
2. PDRB – Harga Konstan 2000 (Triliun Rp.)	238,67	250,33	263,62	278,52	295,27	312,99	333,67	356,77	379,97
3. Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,74	4,89	5,31	5,65	6,01	6,00	6,61	6,92	6,50
4. PDRB Per Kapita									
a. Dalam Jutaan Rupiah	31,12	35,17	38,91	43,41	50,97	58,54	66,40	75,10	85,00
b. Dalam US\$	2,992	3,934	4,597	4,673	5,185	5,913	7,064	7,905	8,947
5. Struktur Ekonomi (%)									
a. Pertanian & Pertambangan	0,68	0,53	0,43	0,46	0,53	0,55	0,56	0,56	0,57
b. Industri, Listrik & Air	28,36	27,68	27,09	28,02	27,20	27,06	27,32	27,34	27,28
c. Perdagangan & Jasa	70,96	71,78	72,48	71,52	72,27	72,39	72,12	72,10	72,15
6. Tingkat Inflasi (%)	11,62	9,08	5,78	5,87	16,06	9,9	7,0	6,5	7,0

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7. Kurs Rp Terhadap US\$		10.400	8.490	8.465	9.290	9.830	9.900	9.400	9.500	9.500
8. Jumlah Wisman (Juta Orang)		1,11	1,16	0,98	1,06	1,17	1,31	1,57	1,82	2,02
9. Total APBD (Trilyun Rp.)		9,27	10,92	11,56	12,26	13,48	17,99	20,00	24,00	28,00
10. Jumlah Penduduk Bekerja (Juta Orang)		3,45	3,27	3,38	3,497	3,58	3,69	3,81	3,91	4,03
INVESTASI										
1. Kebutuhan Pembentukan Modal (investasi) Total – Harga Berlaku (trilyun Rp)		76,07	84,41	96,75	127,15	140,86	153,84	175,49	199,83	227,72
2. Kebutuhan Pembentukan Modal (investasi) Total – Harga Konstan (trilyun Rp)		65,79	66,86	69,16	77,09	78,67	85,02	97,21	108,50	108,97
3. ICOR		6,1	5,8	5,2	4,9	4,9	4,8	4,7	4,7	4,7
4. Kemampuan Investasi Pemda DKI Jakarta (Trilyun Rp)		2,44	3,25	5,55	6,47	6,60	7,45	8,55	9,65	10,60
5. Peranan Investasi Pemda DKI Jakarta Terhadap Investasi Total		4,27	6,58	6,69	5,19	5,29	5,56	5,50	5,49	4,42

Tabel III.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta Menurut Sektor Tahun 2001-2009

Deskripsi	Kondisi Awal					Proyeksi			
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Pertanian	-2,79	-9,15	-15,71	-1,27	0,98	-0,33	-0,1	-0,53	-0,32
2. Pertambangan	-1,01	-3,25	-14,08	-6,81	-7,24	1,21	1,98	2,2	1,80
3. Industri Pengolahan	3,91	4,59	5,05	5,74	5,07	4,39	4,84	5,35	4,75
4. Listrik, Gas & Air Bersih	7,10	6,44	5,70	5,66	6,95	5,93	6,47	6,92	6,83
5. Bangunan	2,29	3,54	4,04	4,42	5,89	4,76	5,42	5,73	5,45
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	5,52	7,26	6,60	6,96	7,89	7,69	8,26	8,51	8,02
7. Pengangkutan & Komunikasi	14,30	12,34	2,57	12,63	13,26	13,69	14,38	14,63	14,09
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	4,19	3,24	3,97	4,17	4,10	4,52	4,93	4,87	4,27

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9. Jasa-jasa	4,09	3,72	5,24	4,65	5,06	5,18	5,98	6,56	6,33
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	4,73	4,89	5,31	5,65	6,01	6,00	6,61	6,92	6,50
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI tanpa MIGAS	4,77	4,94	5,41	5,70	6,06	6,02	6,62	6,94	6,52

Tabel III.4. Matrik Indikator Makro Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2001-2009

Deskripsi	Kondisi Awal					Proyeksi			
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
SOSIAL									
1. Jumlah Penduduk (Juta Orang)	8,43	8,50	8,56	8,64	8,70	8,76	8,81	8,87	8,93
2. Jumlah Angkatan Kerja (Juta Orang)	3,89	3,74	3,82	4,10	4,18	4,26	4,35	4,44	4,57

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	11,32	14,80	14,86	14,70	14,35	13,36	12,33	11,90	11,80
4. Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	327,80	291,32	314,70	370,90	444,53	438,0	431,7	434,6	428,60
5. Persentase Jumlah Penduduk Miskin (%)	3,9	3,5	3,7	4,3	5,1	5,0	4,9	4,9	4,8
6. Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita	1,55	1,55	1,54	1,53	1,53	1,52	1,52	1,51	1,51
7. Angka Kematian Bayi (IMR)	21	19	18	17	16	16	15	14	14
8. Angka Harapan Hidup (e_0)	72,37	72,79	73,15	73,53	74,00	74,13	74,37	74,58	74,64
9. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,90	10,40	10,61	10,78	10,94	11,10	11,27	11,43	11,56
10. Angka Melek Huruf (%)	97,50	98,38	99,53	98,44	99,65	99,70	99,75	99,80	99,82
11. Angka Partisipasi Sekolah									
a. 7 - 12 Tahun	96,03	97,62	98,21	98,40	98,80	99,10	99,20	99,30	99,32
b. 13 - 15 Tahun	88,69	92,24	91,81	92,63	92,50	92,80	93,10	93,40	93,45
c. 16 - 18 Tahun	66,53	68,26	71,57	70,36	72,10	72,90	73,60	74,00	74,51